I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan

otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Konsep dasar otonomi daerah adalah memberikan wewenang pada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dan pemerintah pusat akan membantu dan memelihara kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan di daerah ***(Suparmoko, 2002:9)***.

Hak otonomi daerah diwujudkan dalam Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan sehingga pemerintah daerah dapat mengatur rumah tangga daerahnya sendiri dengan sebaik-baiknya. Pemerintah daerah juga diwajibkan untuk menggali berbagai sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Salah satu unsur pokok dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kemandirian daerah melalui dukungan kemampuan keuangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri ***(Ibnu Syamsi, 1994:221)***.

Menurut Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengapa pajak daerah dan retribusi daerah diperlukan pengelolaan yang baik karena merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan menjadi sumber pendanaan yang penting bagi daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah dan disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah.

Dari sumber keuangan daerah tersebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan yang dianggap paling potensial bagi daerah dalam melaksanakan otonomi dan sumber penerimaan PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sektor yang paling potensial untuk ditingkatkan. Berdasarkan hal tersebut diatas, sangat menarik untuk dapat kita kaji lebih dalam mengenai pajak daerah dan retribusi daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan serta mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri. Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menentukan tingkat perkembangan otonomi suatu daerah. Semakin besar jumlah penerimaan PAD berarti semakin besar pula kesempatan daerah tersebut untuk mengadakan perkembangan dan pembangunan daerah menuju penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Hal ini dapat kita lihat pada tabel dibawah ini yang mana target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Tabel I : Target dan Realisasi PAD Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2013.

No	**Tahun**	**Target (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Pencapaian (%)**
1	2009	812.086.712.989,00	887.877.189.449,12	109,33
2	2010	1.020.250.461.479,00	1.140.983.979.125,43	111,83
3	2011	1.271.960.066.926,50	1.403.505.997.340,66	110,34
4	2012	1.874.304.393.900,78	1.706.131.403.523,60	91,03
5	2013	2.183.413.478.756,32	1.782.079.943.202,59	81,62

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2014.

Dari Tabel I terlihat bahwa Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami naik turun. Pada tahun 2009 target PAD yang dibebankan sebesar Rp. 812.086.712.989,00 terealisasi sebesar Rp. 887.877.189.449,12 atau mencapai 109,33%. Kemudian pada tahun 2010 target PAD mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.020.250.461.479,00 realisasi Rp. 1.140.983.979.125,43 dengan pencapaian 111,83%. Sedangkan di tahun 2011 target sebesar Rp. 1.271.960.066.926,50 realisasi sejumlah Rp. 1.403.505.997.340,66 setara dengan 110,34%. Di tahun 2012 target PAD kembali ditingkatkan menjadi Rp. 1.874.304.393.900,78 namun tidak

teralisasi penuh hanya menembus angka Rp. 1.706.131.403.523,60 dengan persentase 91,03%. Tahun 2013 kembali target dinaikan mencapai Rp. 2.183,413.478.756,32 realisasi PAD kembali tidak terpenuhi yaitu sebesar Rp. 1.782.079.943.202,59 dengan pencapaian 81,62%.

Ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah. Namun dari keempat jenis penerimaan tersebut yang sangat berpotensi untuk dapat dikembangkan oleh Daerah yaitu penerimaan dari sektor Retribusi Daerah. Berikut ini dapat kita lihat Target dan Realisasi PAD dari penerimaan Retribusi Daerah.

Tabel II : Target dan Realisasi dari Penerimaan Retribusi Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2013.

No	**Tahun**	**Target (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Pencapaian (%)**
1	2009	76.393.766.500,00	83.992.026.667,85	109,95
2	2010	6.131.012.500,00	7.012.559.502,00	114,38
3	2011	7.699.962.500,00	8.731.829.812,00	113,40
4	2012	7.535.420.164,00	8.190.683.392,00	108,70
5	2013	8.339.099.000,00	10.070.270.933,05	120,76

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2014.

Dari Tabel II ini dapat kita lihat bahwa Pencapaian PAD dari sektor penerimaan Retribusi Daerah di Provinsi Lampung dalam kurun waktu sejak

tahun 2009 sampai tahun 2013 selalu mencapai target yang telah ditentukan. Di tahun 2009 target PAD sebesar Rp. 76.393.766.500,00 terealisasi sebesar Rp. 83.992.026.667,85 atau mencapai 109,95%. Pada tahun 2010 target PAD mengalami penurunan menjadi Rp. 6.131.012.500,00 realisasi Rp. 7.012.559.502,00 dengan pencapaian 114,38%. Sedangkan di tahun 2011 target naik menjadi Rp. 7.699.962.500,00 realisasi sejumlah Rp. 8.731.829.812,00 setara dengan 113,40%. Tahun 2012 target PAD diturunkan menjadi Rp. 7.535.420.164,00 teralisasi sebesar Rp. 8.190.683.392,00 dengan persentase 108,70%. Tahun 2013 kembali target dinaikan mencapai Rp. 8,339.099.000,00 terealisasi sejumlah Rp. 10.070.270.933,05 dengan pencapaian 120,76%.

Jenis Retribusi Daerah tergolong menjadi 3 (tiga) macam, diantaranya Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Diantara ketiga macam jenis Retribusi Daerah tersebut yang berpotensi untuk mendapatkan keuntungan bagi Daerah karena menganut prinsip-prinsip komersial adalah Retribusi Jasa Usaha. Dapat kita lihat target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut :

Tabel III : Target dan Realisasi dari Penerimaan Retribusi Jasa Usaha di Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2013.

No	**Tahun**	**Target (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Pencapaian (%)**
1	2009	5.436.000.000,00	7.202.300.656,00	132,49
2	2010	4.756.702.000,00	5.249.642.952,00	110,36

3	2011	6.389.252.000,00	7.195.997.512,00	112,63
4	2012	6.012.614.814,00	6.316.906.492,00	105,06
5	2013	6.692.599.000,00	7.665.727.284,05	114,54

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2014.

Berdasarkan Tabel III diatas dapat kita lihat bahwa Pencapaian PAD dari sektor penerimaan Retribusi Jasa Usaha di Provinsi Lampung dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 selalu memenuhi target yang telah dibebankan. Tahun 2009 dari target sebesar Rp. 5.436.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 7.202.300.656,00 atau mencapai 132,49%. Pada tahun 2010 target PAD mengalami penurunan sekitar Rp. 4.756.702.000,00 realisasi PAD sebesar Rp. 5.249.642.952,00 dengan pencapaian 110,36%. Sedangkan di tahun 2011 target naik menjadi Rp. 6.389.252.000,00 terealisasi sejumlah Rp. 7.195.997.512,00 pencapaian sekitar 112,63%. Di tahun 2012 target PAD diturunkan kembali ke angka Rp. 6.012.614.814,00 teralisasi sebesar Rp. 6.316.906.492,00 dengan persentase 105,06%. Dan tahun 2013 kembali target dinaikan menjadi Rp. 6,692.599.000,00 terealisasi sejumlah Rp. 7.665.727.284,05 dengan pencapaian 114,54%.

Salah satu upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling potensial dapat ditingkatkan yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang mana retribusi ini dipungut atas pelayanan dan penggunaan serta pemanfaatan barang-barang atau fasilitas- fasilitas yang dimiliki Pemerintah Daerah guna pembangunan daerah tersebut. Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah ini meliputi sewa tanah dan bangunan, sewa alat-alat berat, sewa rumah dinas, sewa laboratorium, tempat olah raga, dan sebagainya. Dalam 5 (lima) tahun terakhir target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel IV : Target dan Realisasi PAD dari Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2013.

No	**Tahun**	**Target (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Pencapaian (%)**
1	2009	4.794.664.000,-	6.343.816.480,-	132,31
2	2010	4.112.726.000,-	3.781.721.112,-	91,95
3	2011	5.474.564.500,-	6.190.268.362,-	113,07
4	2012	4.474.416.814,-	5.045.151.517,-	112,76
5	2013	4.629.226.000,-	6.069.889.399,-	131,12

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2014.

Dari Tabel IV dapat kita lihat bahwa target PAD dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada tahun 2009 sebesar Rp. 4.794.664.000,- realisasi sebesar Rp. 6.343.816.480,- dengan pencapaian 132,31%. Di tahun 2010 target PAD mengalami penurunan menjadi Rp. 4.112.726.000,- yang mengakibatkan realisasi pun tidak tercapai yaitu hanya Rp. 3.781.721.112,- sekitar 91,95%. Tahun 2011 target PAD menembus angka Rp. 5.474.564.500,- dengan realisasi Rp. 6.190.268.362,- mencapai 113,07%. Kemudian di tahun 2012 target diturunkan kembali Rp. 4.474.416.814,- terealisasi sebesar

Rp. 5.045.151.517,- dengan pencapaian 112,76%. Sedangkan di tahun 2013 di targetkan sebesar Rp. 4.629.226.000,- terealisasi mencapai angka Rp. 6.069.889.399,- mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 131,12%.

UPTD Balai Pengujian / Laboratorium sebagai salah satu sub unit satuan kerja dari Dinas Bina Marga Provinsi Lampung mempunyai kontribusi dalam memenuhi target yang dibebankan oleh Pemerintah Daerah kepada Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, dan khususnya UPTD Balai Pengujian / Laboratorium yang salah satunya melalui sektor sewa laboratorium atau jasa pelayanan pengujian laboratorium. Dalam 5 (lima) tahun terakhir target yang dibebankan kepada UPTD Balai Pengujian / Laboratorium Dinas Bina Marga Provinsi Lampung dari sewa laboratorium atau jasa pelayanan pengujian laboratorium terus meningkat sehingga realisasinya pun diwajibkan harus melampaui target yang telah ditentukan. Kondisi ini dapat kita lihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel V : Target dan Realisasi PAD dari Penerimaan Retribusi Pengujian Laboratorium pada UPTD Balai Pengujian / Laboratorium Dinas Bina Marga Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2013.

No	**Tahun**	**Target (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Pencapaian (%)**
1	2009	23.000.000,-	23.723.600,-	103,15
2	2010	23.000.000,-	44.827.100,-	194,90
3	2011	23.000.000,-	118.723.100,-	516,19

4	2012	43.856.200,-	207.370.300,-	472,84
5	2013	125.000.000,-	199.347.800,-	159,48

Sumber : UPTD Balai Pengujian / Laboratorium Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, 2014.

Dari Tabel V terlihat bahwa pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada UPTD Balai Pengujian / Laboratorium Dinas Bina Marga Provinsi Lampung dalam kurun waktu tahun 2009 – 2013 setiap tahunnya selalu melampaui target yang telah ditentukan. Pada tahun 2009, 2010 dan 2011 target yang dibebankan sebesar Rp. 23.000.000,- realisasi PAD tahun 2009 sebesar Rp. 23.723.600,- atau sebesar 103,15%. Kemudian pada tahun 2010 realisasi PAD mengalami peningkatan sebesar Rp. 44.827.100,- dengan pencapaian 194,90%. Sedangkan di tahun 2011 terjadi peningkatan yang cukup tajam yaitu realisasi sebesar Rp. 118.723.100,- setara dengan 516,19%. Di tahun 2012 target PAD ditingkatkan menjadi Rp. 43.856.200,- realisasi mencapai Rp. 207.370.300,- dengan persentase 472,84. Tahun 2013 kembali target dinaikan menjadi Rp. 125.000.000,- realisasi sebesar Rp. 199.347.800,- dengan pencapaian 159,48%.

Dari uraian diatas, bahwa retribusi dari jasa pelayanan Pengujian Laboratorium yang merupakan salah satu item yang menunjang dari sektor penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sangat erat kaitannya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu penulis mengambil judul "***Kontribusi Jasa Pelayanan Pengujian Laboratorium terhadap Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada UPTD***

Balai Pengujian / Laboratorium Dinas Bina Marga Provinsi Lampung" dengan mencoba melakukan fokus penelitian dan pengkajian yaitu Seberapa Besar Kontribusi Jasa Pelayanan Pengujian Laboratorium Terhadap Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan data-data dan informasi yang penulis dapatkan dari nara sumber di Dinas / Instansi terkait.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan bahwa Seberapa Besar Kontribusi Jasa Pelayanan Pengujian Laboratorium terhadap Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada UPTD Balai Pengujian Laboratorium Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Seberapa Besar Kontribusi Jasa Pelayanan Pengujian Laboratorium Terhadap Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan, sumber informasi dan bahan referensi bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik dengan kontribusi jasa pelayanan pengujian laboratorium terhadap retribusi pemakaian kekayaan daerah.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat memberikan keterangan bagi dinas / instansi maupun pihak lain yang terkait guna bahan evaluasi untuk pengembangan dan penyempurnaan penelitian ini di masa yang akan datang.